

TERORISME DI SELANDIA BARU DAN ISLAMOPHOBIA

7

Simela Victor Muhamad

Abstrak

Aksi teror di dua masjid di Christchurch pada saat pelaksanaan sholat Jumat, 15 Maret 2019 sangat memprihatinkan, tidak saja bagi Selandia Baru tetapi juga bagi dunia. Berbagai negara di dunia dan bahkan Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa (DK PBB) mengecam keras aksi teror tersebut. Presiden Indonesia, Joko Widodo, mengecam keras insiden ini, dan berharap pelakunya memperoleh hukuman berat. Aksi teror tersebut sangat mungkin mengekspresikan Islamophobia. Aksi teror ini seharusnya dijadikan momentum bagi masyarakat internasional, termasuk parlemen, untuk memperkuat kerja sama dalam mempromosikan toleransi dan harmoni, baik di tingkat global, regional, maupun bilateral. Kerja sama tersebut harus mencakup upaya untuk mengatasi Islamophobia yang masih berkembang di negara-negara Barat, terutama melalui penguatan dialog peradaban. Tulisan ini mengkaji mengapa aksi teror di Christchurch dapat terjadi dan bagaimana masyarakat internasional harus menyikapinya.

Pendahuluan

Aksi penembakan massal terhadap warga Muslim di dua masjid di Kota Christchurch, saat pelaksanaan sholat Jumat, 15 Maret 2019 sangat memprihatinkan, tidak saja bagi Selandia Baru tetapi juga bagi dunia. Aksi teror yang menewaskan 50 orang jamaah sholat Jumat tersebut, oleh Perdana Menteri (PM) Selandia Baru, Jacinda Ardern, disebut sebagai "serangan teroris" (*cnn.com.*, 15 Maret 2019). Pelakunya (Brenton Tarrant, asal dari Australia), ditengarai setelah mengunjungi beberapa negara lain (terutama Eropa), mengalami radikalisasi serta memiliki pemikiran

ekstrem mengenai supremasi kulit putih (*white supremacy*). Didukung kemudahan mendapatkan senjata api, pemikiran ekstrem mendorong pelaku melakukan teror mematikan di kota berpenduduk sekitar 404.000 orang itu.

Selandia Baru yang selama ini dikenal damai dan jauh dari pemberitaan aksi terorisme patut terguncang, karena pemerintahan dan masyarakatnya selama ini dikenal sangat toleran dan cukup terbuka terhadap kedatangan kaum imigran, termasuk dari kalangan Muslim. Warga dunia memberikan ucapan simpati dan bela sungkawa kepada pemerintah dan



masyarakat Selandia Baru, dan pada saat yang bersamaan juga mengutuk keras aksi teror tersebut. Tulisan ini mengkaji mengapa aksi terorisme terhadap warga Muslim yang sedang melakukan sholat Jumat di Masjid Al-Noor dan Masjid Linwood, di Kota Christchurch, Selandia Baru dapat terjadi, dan bagaimana masyarakat internasional harus menyikapinya.

Islamophobia

Melihat Brenton Tarrant adalah pendukung gerakan supremasi kulit putih dan tidak menyukai kaum imigran (khususnya kalangan Muslim), maka terjadinya aksi kekerasan di dua masjid di Kota Christchurch sangat mungkin mengekspresikan Islamophobia. Islamophobia adalah ketakutan terhadap segala sesuatu tentang Islam, dan oleh karena itu, semua Muslim menjadi sasaran dan cenderung dimusuhi (Jackson, 2018: 1-29). Konon, pelaku penyerangan mengalami radikalisme, terutama setelah mengunjungi dan menyaksikan beberapa negara Barat, yang menurutnya, keberadaan kaum kulit putih di sana sudah terancam oleh kehadiran kaum pendatang (imigran), khususnya pendatang Muslim.

Islamophobia memang masih berkembang di Barat di mana Muslim menjadi minoritas. Tidak tertutup kemungkinan Muslim didiskriminasi dalam kehidupan ekonomi, sosial, dan kemasyarakatan sebuah bangsa. Menurut *European Islamophobia Report 2017*, gelombang Islamophobia meningkat tajam di Eropa. Telah terjadi 908 kejahatan terhadap umat Islam, mulai dari serangan verbal dan fisik hingga upaya pembunuhan di Jerman,

664 serangan di Polandia, 364 serangan di Belanda, 256 serangan di Austria, 121 serangan di Perancis, 56 serangan di Denmark, dan 36 serangan di Belgia (*European Islamophobia Report, 2017*). Yang cukup mengagetkan, sebagian besar pemerintah negara Eropa tidak menerapkan kebijakan khusus untuk melawan Islamophobia, dan hanya dikategorikan sebagai “kejahatan kebencian” dan “tindakan kriminal bermotif politik”.

Di Australia (negara asal Brenton Tarrant) Islamophobia masih menghinggap sebagian masyarakat, yang terlihat antara lain dari pemberitaan tentang aksi serangan terhadap warga Muslim, seperti yang dialami dua mahasiswi pascasarjana asal Indonesia di Canberra pada minggu pertama bulan Februari 2019 yang mengalami penghinaan dan penyerangan yang diduga karena menggunakan jilbab (*okezone.com*, 13 Februari 2019). Keberadaan politisi sayap kanan, seperti Fraser Anning (Senator Queensland) yang dikenal sebagai anti-imigran, juga menunjukkan adanya Islamophobia di Australia. Di saat dunia tengah berduka dan mengutuk aksi teror penembakan brutal terhadap umat Islam di masjid Christchurch, Senator Anning justru menyalahkan imigran Muslim sebagai penyebabnya.

Meskipun pernyataan Anning tidak mewakili pandangan Australia, bahkan sebaliknya banyak ditentang, termasuk melalui aksi “pelemparan telur” oleh seorang remaja bernama Will Connolly, tetap saja sangat disesalkan karena muncul dari kalangan parlemen. Bukan tidak mungkin, meskipun tidak mudah, pandangan-pandangan Senator Anning dapat saja memengaruhi kebijakan Australia dalam merespons

kehadiran kaum imigran Muslim, atau setidaknya menginspirasi orang-orang semacam Brenton Tarrant yang sudah dihinggapi Islamophobia.

Reaksi Dunia

Berbagai negara di dunia, termasuk Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa (DK PBB), mengecam keras aksi teror di Christchurch. Dengan diinisiasi oleh Kuwait dan Indonesia, DK PBB menyatakan bahwa tindakan terorisme adalah kriminal dan tidak dapat dibenarkan. Terorisme dalam segala bentuk dan manifestasinya merupakan salah satu ancaman paling serius bagi perdamaian dan keamanan internasional. Kecaman juga datang dari Uni Eropa, bahwa serangan ke tempat ibadah adalah serangan terhadap seluruh bangsa, dan aksi seperti ini memperkuat tekad semua pihak untuk bekerja sama melawan fenomena global terorisme dan radikalisme.

Presiden Turki, Recep Tayyip Erdogan menilai insiden di Christchurch telah melampaui batas pelecehan individu dan hampir mencapai titik pembunuhan massal, dan oleh karenanya otoritas setempat harus segera mengambil tindakan. Vladimir Putin dari Rusia menilai serangan terhadap orang-orang yang sedang melakukan ibadah adalah tindakan kejam, dan pelakunya harus dihukum seberat-beratnya. Presiden AS Donald Trump juga turut mengecam aksi terorisme yang terjadi dan menyampaikan duka cita atas nama seluruh bangsa. Presiden Indonesia, Joko Widodo, juga mengecam keras insiden ini, dan berharap pelakunya memperoleh hukuman berat. Malaysia, yang dua warganya

menjadi korban, selain mengutuk keras juga berharap pelakunya dihukum berat. Arab Saudi selain mengutuk, kembali menegaskan bahwa terorisme tidak memiliki agama dan tidak memiliki tanah air, dan menekankan bahwa agama harus dihormati.

Negara-negara anggota Organisasi Kerja Sama Islam (OKI), dalam Konferensi Tingkat Menteri (KTM) Darurat OKI di Istanbul, 22 Maret 2019, melalui dokumen Komunike Akhir-nya (*Final Communiqué*), mengecam aksi teror di Christchurch, seraya menekankan solidaritas dan dukungan kepada Selandia Baru untuk menuntaskan proses hukum bagi pelaku teror. Dalam dokumen itu, seluruh negara OKI meminta komunitas internasional untuk menginisiasi dan mendukung upaya pencegahan intoleransi, diskriminasi, dan stereotip negatif, pengucilan, serta stigmatisasi negatif terhadap Muslim.

Sementara PM Australia, Scott Morrison, menyebut pelaku penyerangan (yang berasal dari Australia) sebagai seorang teroris ekstremis sayap kanan yang keji. Pernyataan PM Australia tersebut seakan menunjukkan bahwa Australia yang selama ini tegas dalam memberantas terorisme, termasuk melalui kerja sama dengan Indonesia, ternyata belum sepenuhnya dapat mengatasi orang-orang ekstremis sayap kanan yang berada di negaranya, yang sesungguhnya juga dapat mendorong tindakan terorisme (seperti yang terjadi di Selandia Baru). Timbul kesan kemudian, dalam isu terorisme, Australia hanya tegas terhadap kelompok radikal Muslim, tetapi tidak tegas terhadap kelompok radikal sayap

kanan. Secara umum, reaksi dunia adalah mengutuk keras serangan teror di Selandia Baru.

Memperkuat Dialog Peradaban

Aksi teror terhadap umat Islam di dua masjid di Christchurch, Selandia Baru, harus dijadikan momentum oleh masyarakat internasional untuk memperkuat dialog peradaban, termasuk di dalamnya mengatasi Islamophobia. Di tingkat global, negara-negara di dunia dapat memanfaatkan Forum Global Aliansi Peradaban atau *United Nations Alliance of Civilization* (UNAOC), lembaga di bawah PBB. Di forum UNAOC ke-8 di New York, 19-20 November 2018, Indonesia pernah mengungkapkan bahwa kurangnya nilai toleransi dan masih adanya perlakuan diskriminasi terhadap sesama warga dunia, ditambah dengan rendahnya kondisi sosial ekonomi, telah memicu berkembangnya aksi terorisme dan ekstremisme di berbagai belahan dunia (termasuk di dalamnya Islamophobia), dan oleh karena itu, perlu ada upaya bersama dari masyarakat internasional untuk terus memperkuat dialog peradaban.

Sidang Umum PBB yang dilaksanakan setiap tahun, sudah tentu perlu dimanfaatkan oleh perwakilan negara-negara di dunia untuk selalu mengingatkan pentingnya penguatan dialog peradaban. Melalui kegiatan dialog secara intensif, perwakilan dari setiap negara dapat berbagi pengetahuan dan pengalaman terbaik dalam mengelola kehidupan masyarakatnya yang majemuk di masing-masing negara. Dialog peradaban yang dibangun, sudah tentu juga, tidak cukup dilakukan hanya melalui pertemuan-

pertemuan internasional, tetapi juga perlu memanfaatkan kemajuan teknologi informasi digital untuk menyebarluaskan nilai toleransi dan perdamaian.

Di tingkat regional, negara-negara di kawasan, sudah tentu juga, perlu mendukung upaya penguatan dialog peradaban, karena faktanya berbagai aksi kekerasan yang dilatarbelakangi sentimen agama dan ras, masih saja terjadi. Untuk tingkat kawasan, Indonesia, dan juga negara-negara ASEAN, dapat memanfaatkan forum ASEAN-Mitra Dialog (yang di dalamnya, antara lain, mencakup Australia, Selandia Baru, dan Amerika Serikat, bahkan Uni Eropa) untuk membangun dan memperkuat kesepahaman tentang pentingnya penguatan kerukunan dan toleransi dalam kehidupan masyarakat di masing-masing negara. Berbagai aksi solidaritas mendukung Muslim yang dilakukan oleh pemerintah dan masyarakat Selandia Baru pasca-peristiwa Christchurch dapat menjadi contoh bagi negara-negara lain.

Di tingkat bilateral, kerja sama antarnegara dalam memperkuat dialog peradaban, sudah tentu juga, perlu terus dilakukan. Melalui dialog secara bilateral, kedua negara yang diwakili oleh kelompok masyarakat dari masing-masing negara dapat secara terbuka dan jujur mengemukakan berbagai permasalahan dan pengalaman yang mereka hadapi, serta solusi yang mungkin bisa ditawarkan untuk mengatasi persoalan sosial kemasyarakatan di masing-masing negara. Dalam kerangka dialog peradaban secara bilateral, Indonesia dan Australia, misalnya, sudah memiliki forum

sendiri, yang disebut forum Dialog Lintas Agama dan Budaya, sebagai bagian dari kemitraan komprehensif dan strategis kedua negara. Pada 13 Maret 2019, dua hari sebelum peristiwa Christchurch, melalui forum tersebut di Bandung kedua negara melakukan pertemuan dalam kerangka menumbuhkembangkan toleransi dan harmoni.

Untuk mendukung pentingnya dialog peradaban, parlemen sudah tentu perlu memainkan peran, setidaknya dengan terus mendukung, dan juga melalui jalur diplomasi parlemen, turut memperkuat upaya global dalam mempromosikan toleransi dan harmoni, dan menentang terorisme dalam segala bentuk dan manifestasinya. Di tingkat global, parlemen, termasuk DPR RI, dapat memanfaatkan forum *Inter-Parliamentary Union* (IPU), dan di kalangan negara-negara OKI melalui *Parliamentary Union of the OIC Member States* (PUIC). Di tingkat kawasan Asia Pasifik melalui *Asia-Pacific Parliamentary Forum* (APPF), dan di lingkup ASEAN melalui *ASEAN Inter-Parliamentary Assembly* (AIPA). Sementara secara bilateral, melalui Grup Kerja Sama Bilateral (GKSB), Anggota DPR RI dapat membangun jejaring dengan anggota parlemen negara-negara sahabat, termasuk anggota parlemen Australia dan Selandia Baru, untuk memperkuat kesepahaman tentang pentingnya memelihara toleransi dan harmoni dalam kehidupan sosial kemasyarakatan di masing-masing negara.

Penutup

Peristiwa terorisme di Selandia Baru perlu dijadikan momentum oleh masyarakat internasional untuk memperkuat kerja sama dalam mempromosikan toleransi

dan harmoni. Kerja sama tersebut harus mencakup upaya untuk mengatasi Islamophobia yang masih berkembang di negara-negara Barat, terutama melalui penguatan dialog peradaban. Dialog peradaban harus dibangun di segala tingkatan, baik tingkat global, regional, maupun melalui jalur bilateral antarnegara. Parlemen, termasuk DPR RI, sebagai representasi rakyat, melalui berbagai jalur diplomasi parlemen perlu mendukung penguatan dialog peradaban serta mempromosikan toleransi dan harmoni.

Referensi

- “Christchurch Mosque Shootings Must End New Zealand’s Innocent about Right-wing Terrorisme”, <https://www.thejakartapost.com/academia/2019/03/15/christchurch-mosque-shootings-must-end-new-zealands-innocence-about-right-wing-terrorism.html>, diakses 18 Maret 2019.
- “Dua Mahasiswi Indonesia Diserang di Australia, Diduga karena Mengenakan Jilbab”, <https://news.okezone.com/read/2019/02/13/18/2017453/dua-mahasiswi-indonesia-diserang-di-australia-diduga-karena-mengenakan-jilbab>, diakses 19 Maret 2019.
- “European Islamophobia Report, 2017”, <http://www.islamophobiaeurope.com/reports/2017-reports/>, diakses 19 Maret 2019.
- Jackson, Leonie B. (2018). “Introduction: Islamophobia and Racism”, dalam Leonie B. Jackson, *Islamophobia in Britain: The Making of a Muslim Enemy*, Palgrave Macmillan, hal. 1-29.
- “Lawan Terorisme”, *Kompas*, 20 Maret 2019, hal. 4
- “New Zealand PM Full Speech: ‘This Can Only be Described as a Terrorist Attack’”, <https://edition.cnn.com/2019/03/15/asia/>

new-zealand-jacinda-ardern-full-statement-intl/index.html, diakses 19 Maret 2019.

“OKI Pantau Islamofobia”, *Republika*, 23 Maret 2019, hal. 9.

“RI Condemn NZ terror attacks”, <https://www.thejakartapost.com/news/2019/03/16/ri-condemns-nz-terror-attacks.html>, diakses 18 Maret 2019.

“Selandia Baru Bersatu Dukung Muslim”, *Republika*, 23 Maret 2019, hal. 1.

“Sikap RI Bantu Selandia Baru”, *Kompas*, 21 Maret 2019, hal. 5.

“Solidaritas Mengalir bagi Korban”, *Kompas*, 17 Maret 2019, hal. 1-7.

Suransky, Sasha Polakow, Sarah Wildman, “The Inspiration for Terrorism in New Zealand Came From France”, [https://](https://foreignpolicy.com/2019/03/16/the-inspiration-for-terrorism-in-new-zealand-came-from-france-christchurch-brenton-tarrant-renaud-camus-jean-raspail-identitarians-white-nationalism/)

foreignpolicy.com/2019/03/16/the-inspiration-for-terrorism-in-new-zealand-came-from-france-christchurch-brenton-tarrant-renaud-camus-jean-raspail-identitarians-white-nationalism/, diakses 18 Maret 2019.

“Trump Kecam Serangan Teror di Selandia Atas 2 Masjid”, <https://dunia.tempo.co/read/1185891/trump-kecam-serangan-teror-di-selandia-baru-atas-2-masjid/full&view=ok>, diakses 18 Maret 2019.

“8th UNAOC Global Forum: Partnership for Prevention and Sustaining Peace”, 20 November 2018, <https://www.unaoc.org/event/8th-unaoc-global-forum/>, diakses 20 Maret 2019.



Simela Victor Muhammad
simela.muhamad@dpr.go.id

Simela Victor Muhammad, Drs, M.Si. adalah Peneliti Madya bidang Hubungan Internasional pada Pusat Penelitian Badan Keahlian (Puslit BKD) DPR RI. Menyelesaikan pendidikan Sarjana (S1) di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP), jurusan Hubungan Internasional, Universitas Katolik Parahyangan, Bandung, 1986, dan Pascasarjana (S2), Program Studi Kajian Wilayah Amerika, Universitas Indonesia, 1999. Beberapa Karya tulis ilmiah yang pernah diterbitkan antara lain: “Kejahatan Transnasional Penyelundupan Narkoba ke Indonesia: Masalah dan Upaya Penanganannya” (bagian dari buku Aktor Non-Negara: Kajian Implikasi Kejahatan Transnasional di Asia Tenggara, Penerbit Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2017); “Isu Keamanan di Semenanjung Korea dan Upaya Damai Parlemen” (artikel di Jurnal Politica, Vol. 7 No. 1, Mei 2016); “Peran Asian Parliamentary Assembly dalam Mendukung Solusi Damai Palestina-Israel” (artikel di Jurnal Politica, Vol. 8 No. 1, Mei 2017).

Info Singkat

© 2009, Pusat Penelitian Badan Keahlian DPR RI
<http://puslit.dpr.go.id>
ISSN 2088-2351

Hak cipta dilindungi oleh undang-undang. Dilarang mengutip atau memperbanyak sebagian atau seluruh isi tulisan ini tanpa izin penerbit.